

RANKHIR RENJA PERUBAHAN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR**



(0361) 428380 

kb.denpasarkota.go.id 



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 JUNI 2025

NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025

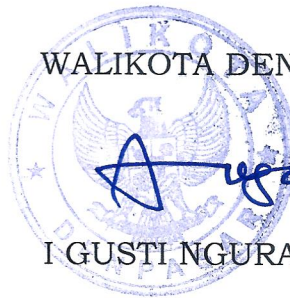
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR :
100.3.3.3/1187/HK/2025 TENTANG
RENCANA KERJA KOTA DENPASAR TAHUN
2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hayang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Wara Nugraha-Nya, Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 telah kami susun.

Rankhir Renja Perubahan Tahun 2025 ini bersifat menyeluruh dan terukur serta menyelaraskan rencana yang dihasilkan melalui rapat perencanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Penetapan Rankhir Rencana Kerja Perubahan TA 2025 ini menjadi produk hukum dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Namun dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Rankhir Renja Perubahan Tahun 2025 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran dan kritik yang dapat kami pergunakan untuk melakukan review sehingga Renja ini semakin baik dan lengkap.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19660311 199503 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LAMPIRAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan hukum	4
I.3 Maksud dan tujuan.....	9
I.4 Sistematika	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025	11
2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja	23
2.3 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENEGNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator dalam pencapaian tujuan pembangunan karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan atau kesenjangan gender. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum dapat mencapai angka yang memperlihatkan kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki (belum mencapai angka mutlak 100). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan target Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2019–2023. Hal tersebut menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Denpasar cukup baik.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tahun 2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali dan Nasional

(Indonesia), nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah. Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan Kota Denpasar di bidang sosial, politik, dan ekonomi masih belum optimal jika dibandingkan perempuan Provinsi Bali dan Indonesia secara umum. Adanya pandemi *covid-19* berpotensi semakin memperburuk kondisi pemberdayaan perempuan karena ekonomi nasional terkena dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menstimulasi perempuan untuk dapat berperan lebih aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk mensiasati bagaimana mendorong peran aktif perempuan dimasa pandemi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, utamanya kasus kekerasan seksual anak. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan, karena adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah domestik dalam keluarga. Selain itu faktor ketidaktahuan dan sulitnya akses menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga Negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya wajib dilindungi oleh negara.

Pemenuhan Hak Anak merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Dalam Bidang Pemenuhan

Hak Anak mencakup tiga bidang yang menjadi wewenang antara lain hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. Upaya pemenuhan hak anak ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing” dan mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas dan terkendalinya mobilitas penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Sejak 1 Januari 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, standar organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar yang sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Provinsi Bali, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan Dokumen Perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
 20. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
 21. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 23. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
 24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;
 26. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

27. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ;
36. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 ;

37. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
38. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar;
39. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);
40. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2026 adalah Renja Tahun kedua sebagai upaya untuk mencapai visi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 yaitu: **KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU**. Proses pemerintahan yang baik pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terarahnya proses pengembangan ekonomi serta kemampuan masyarakat, sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik.

- I.4. Sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Kota Denpasar 2026 adalah sebagai berikut.

I. BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

- II. BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025
 - 2.2 Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 - 2.3 Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

- III. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
 - 3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DENPASAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Denpasar sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 dengan jumlah anggaran Belanja Tahun 2025 Rp.22.499.169.289.992.258.404,- dengan 10 program, 25 kegiatan, dan 53 sub kegiatan. Capaian realisasi sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 Rp 5.422.635.464 (38,56%).

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, diwujudkan melalui dengan 10 program, 25 kegiatan dan 53 sub kegiatan anggaran sebesar Rp.22.499.169.289,-.

Target :

1	Belanja operasi	Rp.	22.470.229.289,-
2	Belanja modal	Rp.	28.940.000,-
3	Total belanja operasi dan belanja modal	Rp.	22.499.169.289,-

Realisasi : sampai bulan Maret Tahun 2025

Realisasi :

1	Belanja operasi	Rp.	5.394.835.464,-
2	Belanja modal	Rp.	27.800.000,-
3	Total belanja operasi dan belanja modal	Rp.	5.422.635.464,-

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Mei 2025		Sisa Anggaran Tahun 2025
					Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
2.08.2.14.0.00.01.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Total	22.499.169.289	38,56	5.422.635.464	17.076.533.825
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Total	14.582.149.789	39,53	4.185.645.894	10.396.503.895
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	13.396.882.139	57,9	3.915.513.878	9.481.368.261
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.226.276.739	39,45	2.879.966.118	7.346.310.621
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	10.226.276.739	39,45	2.879.966.118	7.346.310.621
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		511.066.500	42,57	184.628.500	326.438.000
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	368.798.500	49,13	138.672.500	230.126.000
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.302.000	50,34	10.195.000	10.107.000
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	64.326.000	45	28.786.000	35.540.000
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Laporan	57.640.000	15,46	6.975.000	50.665.000

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.940.000	100	27.800.000	1.140.000
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	23 unit	28.940.000	100	27.800.000	1.140.000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100%	1.850.508.900	40,22	620.052.255	1.230.456.645
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.600.000	41,67	32.893.803	96.706.197
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	1.720.908.900	38,76	587.158.452	1.133.750.448
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik negara		780.090.000	67,29	203.067.005	577.022.995
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	41,67	12.500.000	17.500.000
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	517.050.000	35,86	159.912.005	357.137.995
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	4.400.000	100	4.400.000	-
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	82.140.000	50	23.255.000	58.885.000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	119.000.000	100	-	119.000.000
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	27.500.000	42	3.000.000	24.500.000
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	-Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah,	20 %	105.621.000	41,61	31.775.000	73.846.000

	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Desa dan Kelurahan					
		-Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	20 %				
		-Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,8 %				
2.8.2. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak		35.700.000	52,62	15.975.000	19.725.000
2.08.02. 2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Perangkat Daerah	19.185.000	100	15.135.000	4.050.000
2.08.02. 2.01.0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	16.515.000	5,23	840.000	15.675.000
2.8.2. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			69.921.000	30,61	15.800.000	54.121.000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	69.921.000	30,61	15.800.000	54.121.000
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat Layanan	100 %	258.118.000	14,65	7.492.800	250.625.200

		Komprehensif					
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan Stakeholder dan masyarakat yang mendapat KIE terkait KtP termasuk TPPO	Total	63.166.000	12,21	7.492.800	55.673.200
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.166.000	12,21	7.492.800	55.673.200
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Total	114.350.000	7,68	0	114.350.000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	114.350.000	7,68	-	114.350.000
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	Total	80.602.000	18,15	0	80.602.000
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	80.602.000	18,15	-	80.602.000
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan Pendampingan Kualitas Keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	4,6%	11.799.750	50	4.825.000	6.974.750
2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.825.000	100	4.825.000	0

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.825.000	100	4.825.000	-
2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		6.974.750	0	0	6.974.750
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	6.974.750	0	-	6.974.750
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	56.360.900	57,04	15.410.900	40.950.000
2.8.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Desa/Kel, Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak		56.360.900	57,04	15.410.900	40.950.000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.810.900	100	14.810.900	-
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.550.000	14,08	600.000	40.950.000
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	483.601.000	50,03	208.498.300	275.102.700
2.8.6.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		229.504.000	62,26	100.663.000	128.841.000
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	13 Organisasi	26.220.000	83,07	21.263.000	4.957.000

	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	203.284.000	41,45	79.400.000	123.884.000
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		254.097.000	37,8	107.835.300	146.261.700
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	101.447.000	85,77	86.913.000	14.534.000
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	36.165.000	19,05	3.125.000	33.040.000
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	21.570.000	19,05	3.997.300	17.572.700
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	94.915.000	16,29	13.800.000	81.115.000
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat layanan komprehensif	100 %	269.767.000	7,72	2.130.016	267.636.984
2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan	Total	137.925.000	6,51	2.130.016	135.794.984

	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
2.08.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	685 orang	101.500.000	0	0	101.500.000
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	36.425.000	6,51	2.130.016	34.294.984
2.08.07.2.02	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan Anak, TPPO, ABH	Total	115.790.000	8	0	115.790.000
2.08.07.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	115.790.000	8	0	115.790.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Total	16.052.000	0,93	0	16.052.000
2.08.07.2.03.02	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.052.000	0,93	0	16.052.000
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Total	7.917.019.500		1.236.989.570	6.680.029.930

2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	2,3 %	217.900.000		39.725.000	178.175.000
		-Persentase Kelompok Kerja Bangsa Kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang Efektif	9,3 %				
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		217.900.000	31,53	39.725.000	178.175.000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan	59.950.000	27,97	6.075.000	53.875.000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	21.750.000	34,71	7.550.000	14.200.000
	Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	2 Laporan	124.200.000	20	24.600.000	99.600.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	12.000.000	27,5	1.500.000	10.500.000
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terlayani(Unmetneed)	7,81 %	2.928.260.000	42,26	188.904.020	2.739.355.980
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal	Total	485.180.000	48,96	13.600.000	471.580.000
2.14.3.2.01.010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	48.800.000	48,96	8.500.000	40.300.000
2.14.3.2.01.011	Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangsa kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	2 Laporan	101.400.000	40%	5.100.000	96.300.000

		Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
2.14.3.2.01.012	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000	75		125.000.000
2.14.3.2.01.013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program bangga kencana sesuai Kearifan Budaya Local	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	10.000.000	10		10.000.000
2.14.3.2.01.014	Advokasi Program Bangga Kencana dan Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	199.980.000	30	-	199.980.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Cakupan Pemberdayaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Total	344.000.000	30,00%	68.800.000	275.200.000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	430 orang	344.000.000	30,00%	68.800.000	275.200.000
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Total	2.026.520.000	26,53	106.504.020	1.920.015.980
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	1698 Orang	1.913.620.000	46,26	89.704.020	1.823.915.980

	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9 Laporan	50.400.000	33,33	16.800.000	33.600.000
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 orang	62.500.000	0	-	62.500.000
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	Total	72.560.000	40	-	72.560.000
2.14.03.2.04.06	PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	26 Kampung	72.560.000	40	-	72.560.000
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (BKB,BKR,BKL)	15 %	4.770.859.500	42,53	1.008.360.550	3.762.498.950
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Total	359.864.000	27,58	40.480.550	319.383.450
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Layanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/Dokumen	9.560.000	60	-	9.560.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	10 Unit	130.000.000	0	-	130.000.000

	BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	128 orang	220.304.000	22,73	40.480.550	179.823.450
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL) serta PPKS, PIK-R dan UPPKS		4.410.995.500	36,07	967.880.000	3.443.115.500
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Ormas Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	721.595.500	32,13	230.000.000	491.595.500
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita]	Cakupan pemantaun data dan informasi keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	3.689.400.000	40	737.880.000	2.951.520.000

Berdasarkan Tabel di atas terkait Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Masih terdapat anggaran belanja yang belum terealisasi sesuai anggaran kas
- Masih terdapat SPJ dalam proses yang masih dalam tahap pencairan

2.2 Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja

- a. Terdapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 per tanggal 25 Januari 2025. Dalam beberapa kegiatan terdapat ketidaksesuaian perencanaan pada DPA induk untuk merealisasikannya sehingga diperlukan perubahan beberapa uraian yang waktu perubahannya harus menunggu perubahan DPA pada APBD Perubahan.
- b. Terdapat SPJ yang masih dalam proses dan SP2D terbit di bulan April sehingga pencatatan realisasi keuangan masuk ke Triwulan II.
- c. Pada kegiatan pelayanan anggaran yang direalisasikan berdasarkan kasus yang ditangani sehingga sulit menetapkan target layanan karena pelaporan dan penanganan kasus bersifat fluktuatif.
- d. Terdapat perbedaan harga pada saat penganggaran dengan harga pada e-katalog sehingga ada SILPA akibat efisiensi harga pada beberapa kegiatan.

2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti di atas adalah:

- a. Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
- b. Penyusunan anggaran kas dengan lebih optimal sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan
- c. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan

wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.

- d. Melakukan pembinaan, pelatihan, pengelolaan, pengembangan dan pelestarian secara berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

- a. Jumlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2023 terdiri dari 10 Program dan 25 kegiatan 53 sub kegiatan.
- b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif : Total kebutuhan dana/pagu indikatif Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2025 sebesar Rp. 923.835.414,- dengan rincian pada Tabel 3.1.
- c. Penjabaran pagu anggaran pada tabel 3.1 mengacu pada DPA Pergeseran IV Dimana terdapat penyesuaian anggaran gaji untuk PPPK sehingga pagu awal senilai Rp. 22.499.169.289,-

Rumusan Rencana Program /Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1

Rencana Perubahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja sebelum perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					Rp	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Total	Total	23.398.840.712	23.423.004.703	508.166.741	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Total	Total	15.289.138.212	15.264.585.203		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	13.034.715.062	14.075.733.553		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	9.959.708.932	10.664.977.753		
2.08.01.2.02.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	36 Orang/bulan	9.959.708.932	10.664.977.753	705.268.821	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	581.205.500	614.666.900		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	386.525.500	451.670.900	65.145.400	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.302.000	23.288.000	2.986.000	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.698.000	64.326.000	(2.372.000)	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.680.000	75.382.000	(32.298.000)	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	28.940.000	39.240.000		
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	73 unit	23 unit	28.940.000	39.240.000	10.300.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100%	100%	1.684.770.630	1.953.258.900		
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.600.000	142.350.000	12.750.000	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.555.170.630	1.810.908.900	255.738.270	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik negara	100%	100%	780.090.000	803.590.000		
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	-	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	517.050.000	517.050.000	-	
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	1 unit	4.400.000	4.400.000	-	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	107 Unit	82.140.000	82.140.000	-	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	119.000.000	119.000.000	-	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	27.500.000	51.000.000	23.500.000	

2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan	20 %	20 %	202.761.500	108.325.000		
		-Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	20 %	20 %				-
		-Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,8 %	9,8 %				-
2.8.2. 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	80.920.500	35.700.000	(45.220.500)	
2.08.02. 2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan	93 orang	93 orang	24.215.500	19.185.000	(5.030.500)	
2.08.02. 2.01.0008	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	56 orang	56 orang	56.705.000	16.515.000	(40.190.000)	
2.8.2. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Kecamatan	4 Kecamatan	121.841.000	72.625.000		
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	121.841.000	72.625.000	(49.216.000)	
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat Layanan Komprehensif	60%	60%	510.564.500	258.118.000	(252.446.500)	
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan	Meningkatnya cakupan	160 orang	160 orang	70.370.000	63.166.000	(7.204.000)	

	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Stakeholder dan masyarakat yang mendapat KIE terkait KtP termasuk TPPO						
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	70.370.000	63.166.000	(7.204.000)	
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	230.140.000	114.350.000	(115.790.000)	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	100 Layanan	230.140.000	114.350.000	(115.790.000)	
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab./Kota	-	-	210.054.500	80.602.000	(129.452.500)	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	35 Orang	210.054.500	80.602.000	(129.452.500)	
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan Pendampingan Kualitas Keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	9,30%	9,30%	35.231.000	11.799.750	(23.431.250)	
2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	5.525.000	4.825.000	(700.000)	

	Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.525.000	4.825.000	(700.000)	
2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	29.706.000	6.974.750	(22.731.250)	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	29.706.000	6.974.750	(22.731.250)	
2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak pada OPD	75%	75%	63.659.400	56.360.900	(7.298.500)	
2.8.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah OPD, jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Desa/Kel ,Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	1 Profil	1 Profil	63.659.400	56.360.900	(7.298.500)	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	16.159.400	14.810.900	(1.348.500)	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000	41.550.000	(5.950.000)	

2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	Utama	1.378.819.000	483.601.000	(895.218.000)	
2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	648.282.000	229.504.000	(418.778.000)	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	13 Organisasi	81.850.000	26.220.000	(55.630.000)	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	566.432.000	203.284.000	(363.148.000)	
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	730.537.000	254.097.000	(476.440.000)	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	110.742.000	101.447.000	(9.295.000)	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	140.256.000	36.165.000	(104.091.000)	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	5 Dokumen	5 Dokumen	27.275.000	21.570.000	(5.705.000)	

		Kabupaten/Kota						
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	452.264.000	94.915.000	(357.349.000)	
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat layanan konprehensif	71%	71%	63.387.750	270.647.000		
2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	45.120.500	138.805.000		
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	-	685 orang	0	101.500.000	101.500.000	
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	45.120.500	37.305.000	(7.815.500)	
2.08.07.2.02	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	200 orang	200 orang	0	115.790.000	115.790.000	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	100 Layanan	0	115.790.000	115.790.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	18.267.250	16.052.000	(2.215.250)	
2.08.07.2.03.0005	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.267.250	16.052.000	(2.215.250)	
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN		Total	Total	8.109.702.500	8.158.419.500		

	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	2,3 %	2,3 %	37.150.000	217.900.000	180.750.000	
		-Persentase Kelompok Kerja Bangsa Kencana di Kecamatan dan Desa Lurah yang Efektif	13,9 %	13,9 %				
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			37.150.000	217.900.000	180.750.000	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	3 Laporan	-	59.950.000	59.950.000	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	37.150.000	21.750.000	(15.400.000)	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	-	2 Laporan	-	124.200.000	124.200.000	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	2 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terlayani(Unmetneed)	7,38 %	7,38 %	7.018.450.000	2.939.660.000		
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal			6.955.950.000	496.580.000		
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan	-	48.800.000	48.800.000	

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	2 Laporan	6.094.360.000	101.400.000	(5.992.960.000)	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	4 Dokumen	-	125.000.000	125.000.000	
2.14.3.2.01.013	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program bangga kencana sesuai Kearifan Budaya Local	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	861.590.000	21.400.000	(840.190.000)	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana dan Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	-	199.980.000	199.980.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Cakupan Pemberdayaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	77,25 %	77,25%	0	344.000.000	344.000.000	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	430 orang	-	344.000.000	344.000.000	
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan		0,0092	0,0092	62.500.000	2.026.520.000	1.964.020.000	

	KB di Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	1698 Orang	-	1.913.620.000	1.913.620.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	9 Laporan	-	50.400.000	50.400.000	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 orang	100 orang	62.500.000	62.500.000	-	
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	-	-	-	72.560.000	72.560.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	26 Kampung	-	72.560.000	72.560.000	
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (BKB, BKR, BKL)	16 %	16 %	1.054.102.500	5.000.859.500		
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			329.507.000	359.864.000	30.357.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Layanan	-	1 Laporan/ Dokumen	-	9.560.000	9.560.000	

		Keluarga Sejahtera (PPKS)						
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	10 Unit	-	130.000.000	130.000.000	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	128 orang	128 orang	329.507.000	220.304.000	(109.203.000)	
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL) serta PPKS, PIK-R dan UPPKS			724.595.500	4.640.995.500		
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Ormas Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	4 Organisasi	724.595.500	951.595.500	227.000.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita]	Cakupan pemantaun data dan informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 Laporan	-	3.689.400.000	3.689.400.000	

BAB IV

PENUTUP

Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Tahunan dimana tahapan penyusunan meliputi, penyiapan rancangan, penyiapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Rankhir Rencana Kerja Perubahan 2025 diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2025 dan hasilnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk dapat secara optimal merealisasikan program – program yang telah direncanakan dalam Rankhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai, sehingga sangat diperlukan kejelian dalam menentukan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19660311 199503 2 001

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	tidak		
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Denpasar, 19 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



(Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si)

Pembina Utama Muda

NIP : 19660311199503 2 001